

**LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
TRIWULAN III TAHUN 2022**



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KELAS II

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Triwulan III Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Semarang. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekaligus persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Semarang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Semarang dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Triwulan III Tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 September 2022

Ketua Tim,

Ni Made Ari Artini, SH.

NIP. 19840424 201101 2 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Rencana Kerja Pelaksanaan	4
D. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	4
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	5
A. Metodologi Survei	5
B. Teknik Pengumpulan Data	5
C. Teknik Analisa Data	5
D. Variabel Pengukuran IPK	5
BAB III PROFIL RESPONDEN	7
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	17
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Survey Persepsi Anti Korupsi ini bertujuan untuk mengukur persepsi korupsi pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun Tujuan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang obyektif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna Pengadilan.
2. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pimpinan sebagai dasar menentukan tindaklanjut dan upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Mengetahui tingkat kepercayaan publik kepada Pengadilan Negeri Semarang.

C. RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli - 30 September 2022 dengan menetapkan target Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,82 (*tiga koma delapan puluh dua*)

D. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan survey ini adalah:

1. Tim survey menentukan metode survey.
2. Tim survey membuat instrument berupa kuisisioner.
3. Tim survey memperbanyak kuisisioner, menentukan jadwal pelaksanaan survey.
4. Tim survey melakukan survey sesuai jadwal.
5. Kuisisioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas diserahkan kepada ketua tim survey.
6. Tim survey menganalisa kuisisioner yang sudah terisi.
7. Tim survey menyajikan hasil analisa dalam bentuk deskriptif.
8. Hasil analisa diserahkan kepada MR.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODOLOGI SURVEI

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif.

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka.

Sebagai sample pada penelitian ini berjumlah 85 orang responden yang di ambil secara *simple random sampling* terhadap pengguna Pengadilan yang telah mendapatkan pelayanan, terdiri dari:

1. PNS
2. TNI
3. POLRI
4. Swasta
5. Wirausaha
6. Tenaga Kontrak
7. Lainnya

C. TEKNIK ANALISA DATA

Setelah data terkumpul data pada penelitian ini dianalisis dengan analisis statistik deskriptif.

D. VARIABEL PENGUKURAN IPK

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014

Tentang Pedoman Survey Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 ruang lingkup antara lain:

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh

4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparasi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

BAB III
PROFIL RESPONDEN

a. Umur Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	17 Tahun s/d 30 Tahun	35	41,18
2	31 Tahun s/d 40 Tahun	27	31,76
3	41 Tahun s/d 50 Tahun	13	15,29
4	51 Tahun s/d 60 Tahun	10	11,76
5	Diatas 61 Tahun	0	0,00
		85	100,00

Mayoritas responden ini berumur 17 tahun sampai dengan 30 tahun dengan jumlah 35 orang dari total 85 responden (41,18%).

b. Jenis Kelamin Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-laki	56	65,88
2	Perempuan	29	34,12
		85	100,00

Mayoritas responden ini berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 56 orang dari total 85 responden (65,88%).

c. Pendidikan Terakhir Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak / Belum Sekolah	0	0,00
2	SD	3	3,53
3	SMP	3	3,53
4	SMU	30	35,29
5	Diploma 1	3	3,53
6	Diploma 2	0	0,00
7	Diploma 3	1	1,18
8	S1	35	41,18
9	S2	8	9,41
10	S3	2	2,35
		85	100,00

Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah SMU yang berjumlah 35 orang dari total responden 85 orang (41,18%).

d. Pekerjaan Utama Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	11	12,94
2	TNI	1	1,18
3	POLRI	4	4,71
4	SWASTA	29	34,12
5	WIRUSAHA	11	12,94
6	TENAGA KONTRAK	5	5,88
7	LAINNYA	24	28,24
		85	100,00

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah Swasta yaitu 29 orang dari total responden 85 orang (34,12%).

BAB IV

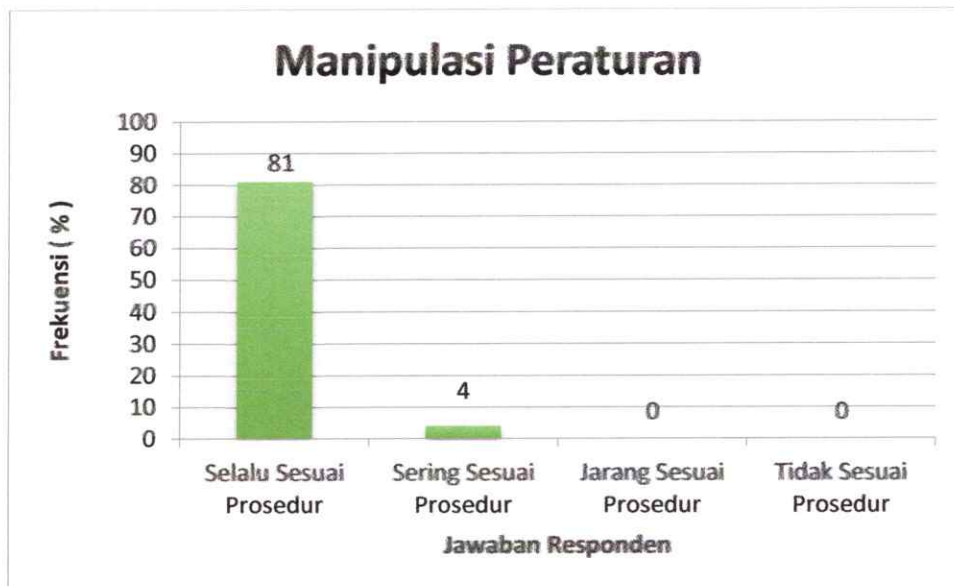
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan di peroleh Survey Persepsi Anti Korupsi Unit Pelayanan sebesar **3,88**. Analisis selanjutnya disajikan berdasarkan masing - masing ruang lingkup pelayanan:

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Hasil analisis pada ruang lingkup secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini.

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu Sesuai Prosedur	4	81	95,29
2	Sering Sesuai Prosedur	3	4	4,71
3	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0,00
4	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0,00
JUMLAH			85	100,00

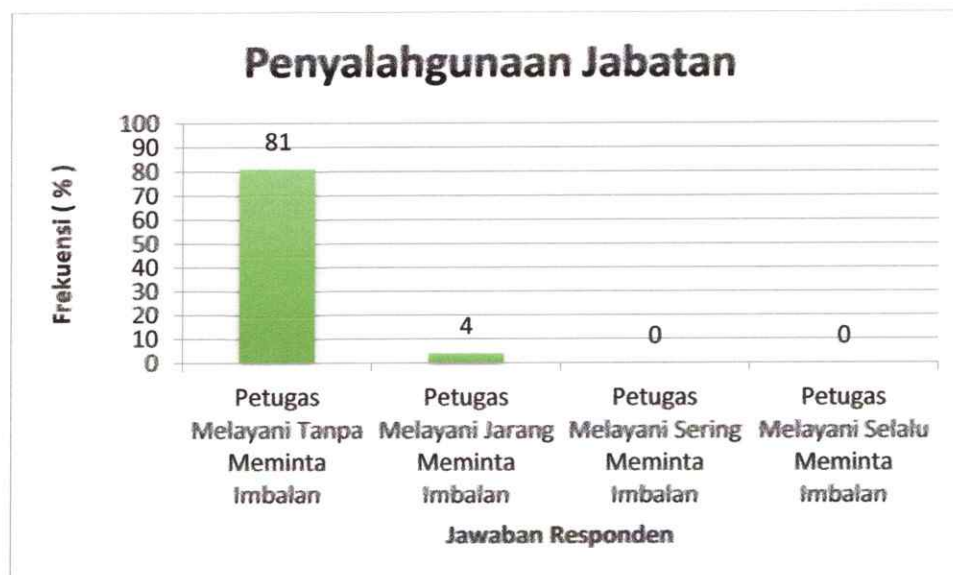


Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (95,29%) menyatakan pelayanan petugas bersih dari Manipulasi Peraturan. Indeks Indikator Manipulasi Peraturan adalah 3,95

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Hasil analisis pada ruang lingkup secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	4	81	95,29
2	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	3	4	4,71
3	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	2	0	0,00
4	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	0	0,00
JUMLAH			85	100,00

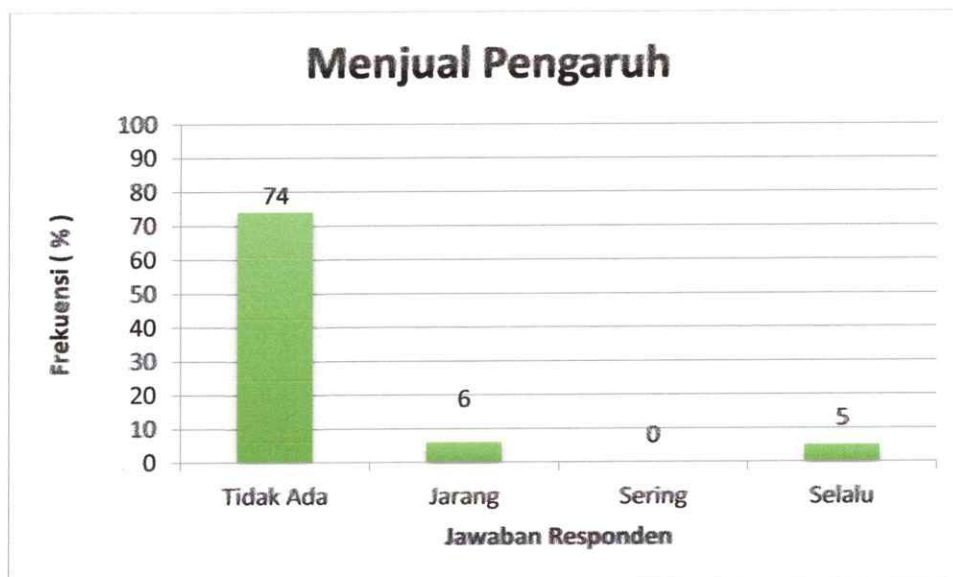


Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (95,29%) menyatakan memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Semarang secara cepat dan mudah tanpa memberi imbalan kepada petugas. Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan adalah 3,95.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Hasil analisis pada Indikator Menjual Pengaruh secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Ada	4	74	87,06
2	Jarang	3	6	7,06
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	5	5,88
JUMLAH			85	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (87,06%) menyatakan tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara.

Indeks Indikator Menjual Pengaruh adalah 3,75.

4. Indikator Transparansi Biaya

Hasil analisis pada Indikator Transaksi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	81	95,29
2	Sering	3	3	3,53
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	1	1,18
JUMLAH			85	100,00

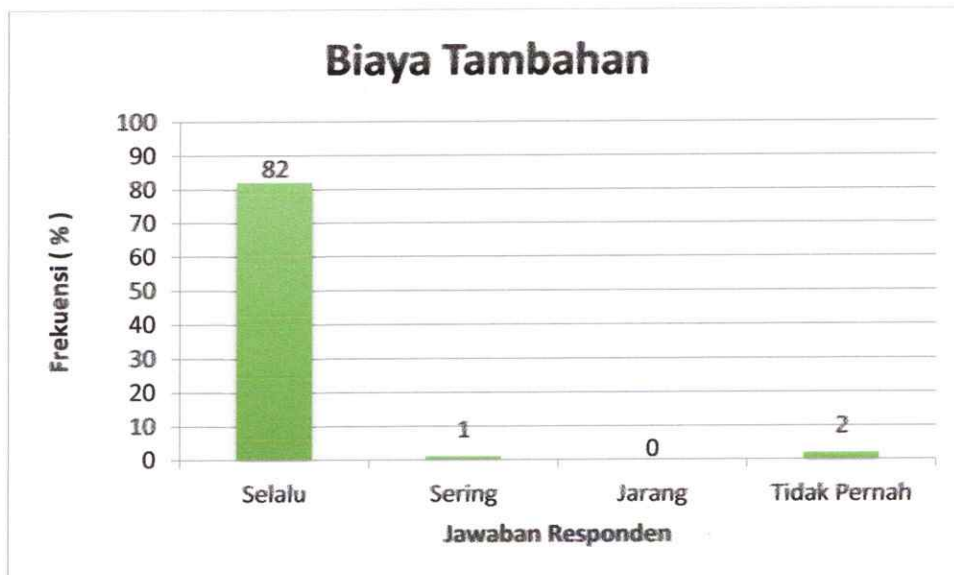


Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (95,29%) menyatakan mudah dalam mendapatkan informasi tentang biaya/tarif baik melalui website ataupun petugas layanan. Indeks Indikator Transparansi Biaya adalah 3,93.

5. Indikator Biaya Tambahan

Hasil analisis pada ruang lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	82	96,47
2	Sering	3	1	1,18
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	2	2,35
JUMLAH			85	100,00

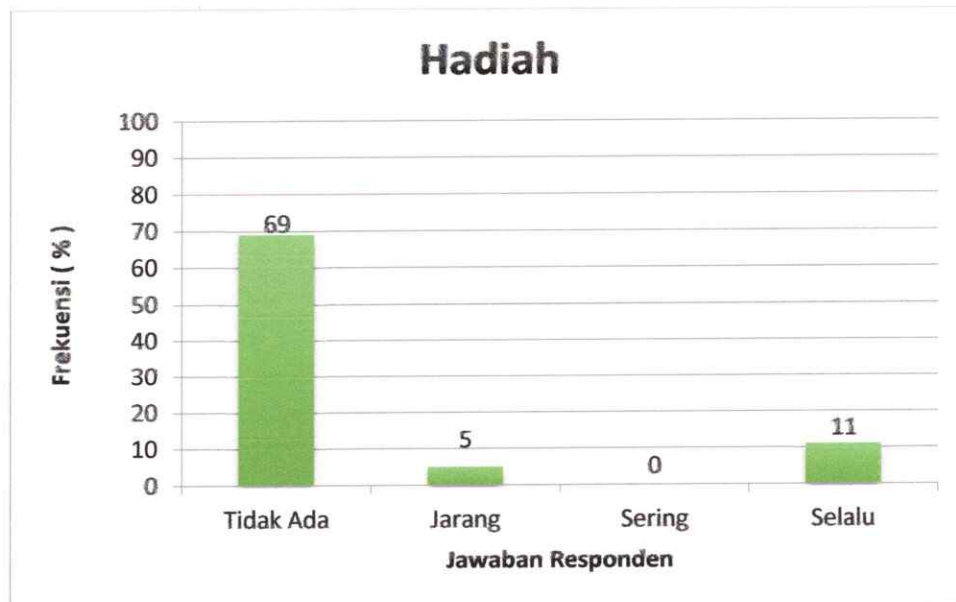


Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (96,47%) menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan. Indeks Indikator Biaya Tambahan adalah 3,92.

6. Indikator Hadiah

Hasil analisis pada Indikator Hadiah secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Ada	4	69	81,18
2	Jarang	3	5	5,88
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	11	12,94
JUMLAH			85	100,00

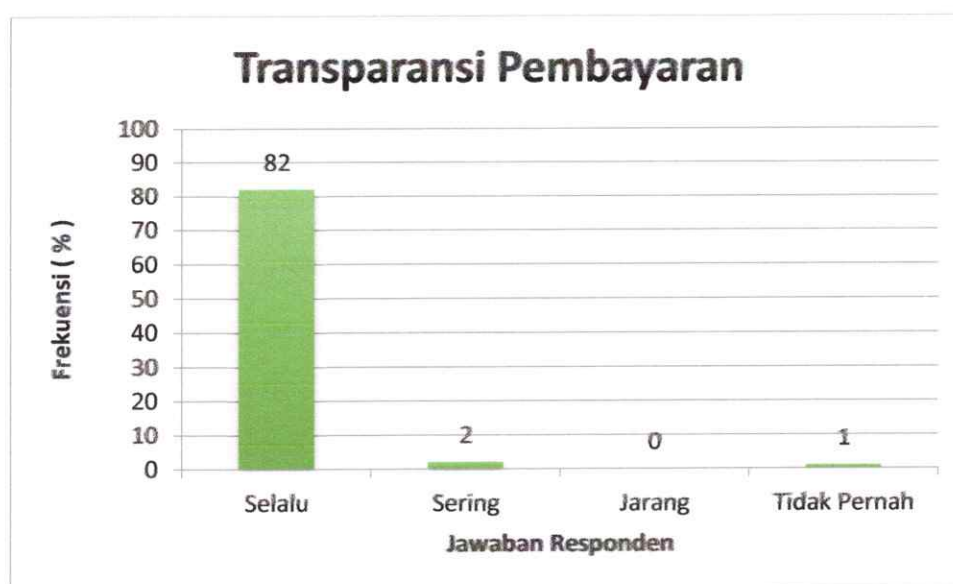


Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (81,18%) menyatakan tidak pernah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta). Indeks Indikator Hadiah adalah 3,55.

7. Indikator Transparansi Pembayaran

Hasil analisis pada ruang lingkup Perilaku Pelaksana Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	82	96,47
2	Sering	3	2	2,35
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	1	1,18
JUMLAH			85	100,00

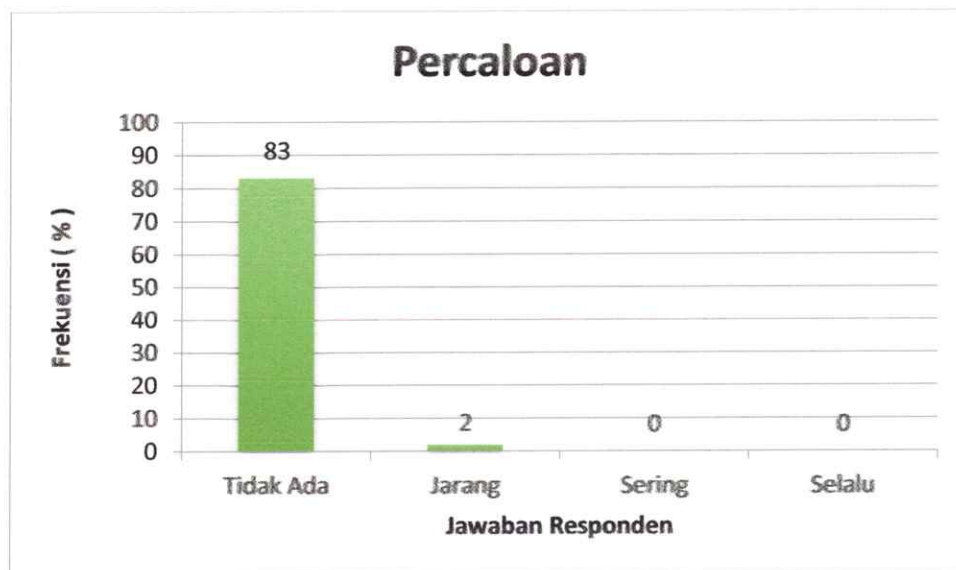


Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (96,47%) menyatakan menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan. Indeks Indikator Transparansi Pembayaran adalah 3,94.

8. Indikator Percaloan

Hasil analisis pada Indikator Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Ada	4	83	97,65
2	Jarang	3	2	2,35
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			85	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (97,65%) tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan. Indeks Indikator Percaloan adalah 3,98.

9. Indikator Perbuatan Curang

Hasil analisis pada ruang lingkup Indikator Perbuatan Curang secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Ada	4	81	95,29
2	Jarang	3	4	4,71
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			85	100,00

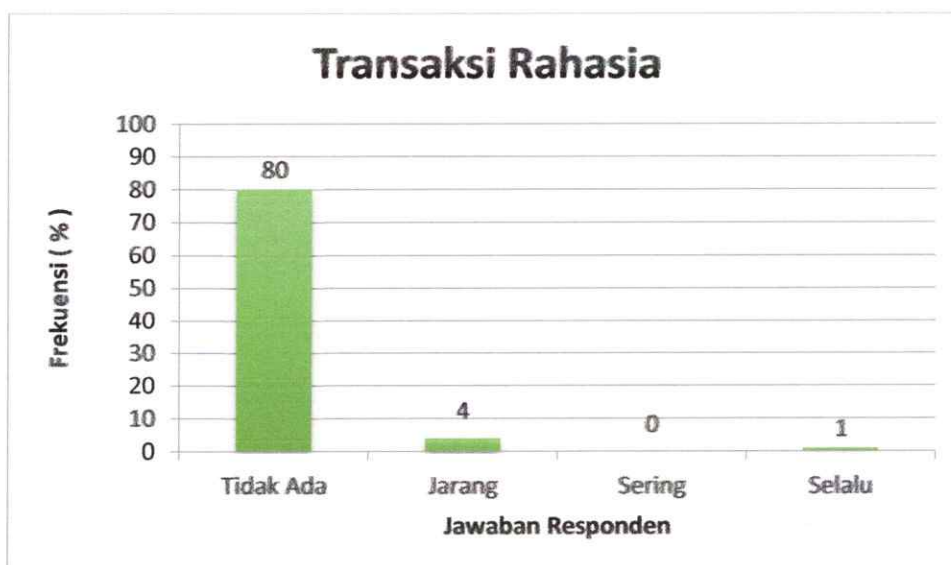


Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (95,29%) responden menyatakan tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan. Indeks Indikator Perbuatan Curang adalah 3,95.

10. Indikator Transaksi Rahasia

Hasil analisis pada ruang lingkup Indikator Transaksi Rahasia secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Ada	4	80	94,12
2	Jarang	3	4	4,71
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	1	1,18
JUMLAH			85	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (94,12%) responden menyatakan tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan di luar persidangan. Indeks Indikator Transaksi Rahasia adalah 3,92.

Dalam survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan ini terdapat beberapa responden yang memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

- 1 Pegawai Pengadilan Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Masyarakat Dan Masyarakat Sangat Terbantu Dengan Pelayanan Yang Diberikan.
- 2 Pelayanan Yang Diberikan Sangat Baik Dan Cepat,Mohon Untuk Ditingkatkan
- 3 Pelayanannya Baik Dan Cepat
- 4 Memberikan Pelayanan Yang Terbaik
- 5 Sangat Baik Ramah
- 6 Sangat Bagus Dan Tepat Waktu
- 7 Jadwal Sidang Agar Diantri Menurut Nomor Antrian
- 8 Pelayanan Baik, Cepat Dan Ramah
- 9 Pelyanan Sangat Memuaskan
- 10 Pegawai Pengadilan Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Kepada Masyarakat
- 11 Mantap
- 12 Pertahankan Kualitas Pelayanan..
- 13 Berjalan Baik Sudh Sesuai Dengan Prosedur Yg Berlaku
- 14 Ramah Dan Cepat
- 15 Baik
- 16 Memuaskan
- 17 Lebih Ditingkatkan
- 18 Pelayanan Selalu Cepat Dan Petugas Ramah
- 19 Pelayanan Sudah Bagus Dan Untuk Acara Sidang Agar Lebih Tertib Sesuai Antrian Sidang
- 20 Pelayanan Sudah Cukup Bagus
- 21 Sangat Baik
- 22 Pelayanan Di Pengadilan Negeri Semarang Sudah Baik, Mohon Ditingkatkan Lagi Agar Masyarakat Selalu Mendapatkan Pelayanan Yang Terbaik
- 23 Bagus Cuma Beberapa Kali Sidang Wwaktunya Tidak Tepat
- 24 Tidak Ada Grativikasi
- 25 Jaga Dan Tingkatkan Pelayanan Agar Masyarakat Semakin Puas
- 26 Pelayanan Sudah Sangat Baik, Tetap Dipertahankan Dan Tingkatkan
- 27 Pelayanan Sangat Baik
- 28 Sangat Memuaskan.
- 29 -

- 30 Good Job
- 31 Baik
- 32 Pegawai Disini Sangat ramah Dan Mengutamakan Masyarakat Yg Membutuhkan Bantuan Dibidang Hukum
- 33 Pelayanan Sangat Baik Dan Ramah, Cepat
- 34 Baik
- 35 Pelayanan Baik
- 36 Sangat Memuaskan Ramah Dan Sopan
- 37 Baik
- 38 Pelayanan Persidangan Sudah Bagus
- 39 Tingkatkan Pelayanan Agar Lebih Baik
- 40 Layanan PN Semarang Sudah Cukup, Agar Ditingkatkan Lagi Layanan Sehingga Yang Diharapkan Layanan Dapat Diterima Oleh Para Pemohon Layanan
- 41 Saya Mendapatkan Pelayanan Sidang Dan Sudah Bagus
- 42 Petugas Ramah, Pelayanan Juga Cepat
- 43 Layanan Persidangan Sudah Baik Dan Harap Selalu Ditingkatkan Kualitas Pelayanan
- 44 Tetap Dipertahankan
- 45 Pelayanan Sudah Baik Dan Ramah, Lebih Ditingkatkan Lagi Dan Dipertahankan
- 46 Baik Dan Cukup Baik
- 47 Agar Pelayanan Persidangan Lebih Ditingkatkan Lagi
- 48 Baik, Ringkas, Jelas
- 49 Pelayanan Cepat, Tanggap Dan Ramah
- 50 Pelayanan Sudah Bagus.... Dan Perlu Dijaga Konsistensinya
- 51 Pelayanan Sudah Baik, Saran Agar Kecepatan Waktu Pelayanan Agar Ditingkatkan
- 52 Untuk PN Semarang Pelayanan Kepada Masyarakat Sudah Bagus
- 53 Pertahankan Kinerja Dan Pelayanan Pn Klungkung
- 54 Baik Dan Ramah Nyaman
- 55 Terima Kasih
- 56 Untuk Persidangan Agar Lebih Teratur Antrian Sidangnya
- 57 Tetap Pertahankan Kualitas Pelayanan
- 58 Sarana Dan Pelayanan Sudah Bagus
- 59 Pengadilan Klungkung Sudah Bagus..Petugas Ramah
- 60 Untuk Antrian Sidang Agar Lebih Diperhatikan
- 61 Terima Kasih Saya Telah Mendapatkan Informasi Untuk Penelitian
- 62 Pelayanan Pada PN Semarang Sangat Baik, Semoga Kedepannya Semakin Baik Lagi
- 63 Sangat Bagus Sekali
- 64 Pelayanan Dipengadain Sangat Bagus Mudah Mencari Informasi

- 65 Cepat, Dan Sigap
- 66 Untuk Perparkiran Blm Tertata Rapi
- 67 Pelayanannya Bagus
- 68 Pelayanan Di Makamah Agung Sangat Memuaskan
- 69 Sudah Sangat Bagus
- 70 Baik
- 71 Baik
- 72 Pelayanan Sangat Bagus Perlu Di Tingkatkan Kembali
- 73 Terima Kasih Atas Informasinya. Pelayanan Sudah Bagus
- 74 Supaya Pengadilan Negeri Semarang Bisa Melayani Masyarakat Dengan Lebih Baik
- 75 Sudah Bagus Pertahankan
- 76 -
- 77 Sangat Baik
- 78 Makasih Ya Sudah Cukup Baik
- 79 Tolong Tingkatkan Lagi
- 80 Cukup Bagus Dan Petugas Cekatan
- 81 Pelayanan Yang Sangat Baik Dan Sopan
- 82 Pelayanan Yang Sangat Bagus
- 83 Sudah Baik
- 84 Pertahankan Terus Pelayanan Yang Baik
- 85 Pengadilan Semarang Pelayanan Sudah Bagus Dan Selalu Berbenah

Nilai Rata-Rata Per Unsur Indikator

No	Unsur Korupsi	Nilai Rata-rata Per Unsur
U1	Manipulasi Peraturan	3,95
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,95
U3	Menjual Pengaruh	3,75
U4	Transparansi Biaya	3,93
U5	Biaya Tambahan	3,92
U6	Hadiah	3,55
U7	Transparansi Pembayaran	3,94
U8	Percaloan	3,98
U9	Perbuatan Curang	3,95
U10	Transaksi Rahasia	3,92
Indeks Persepsi Anti Korupsi		3,88

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN DAN SARAN

Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Triwulan III tahun 2022 adalah 3,88. Hal ini mencerminkan citra yang baik dari masyarakat dan memberikan optimisme semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Semarang.

B. SARAN

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan harus pula diimbangi dengan menjaga integritas yang tinggi dari segenap aparatur Pengadilan Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prof.drs.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977
2. Prof.drs.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 3. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977
3. Drs.Ridwan, M.B.A. Dasar – dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Semarang. 2008
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Persepsi Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.